

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN DI DISTRIK ALAMA KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA¹**

Oleh : Konianus Amisim²

ABSTRAK

Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik dari segi politik ekonomi, budaya, pendidikan, terlebih tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh sebab itu Dinas pendidikan harus berperan aktif, terkait dengan program-program yang akan dilakukan mulai dari, TK SD,SMP,sampai SMA/SMK.

Khusus di wilayah di Distrik Alama kabupaten Mimika Provinsi Papua , hasil pengamatan penulis masalah pendidikan masih buruk, hal ini disebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, ditambah dengan jumlah tenaga pendidik, dan kualitas pendidik yang belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Papua, selain itu wilayah topografi papua yang dapat dikatakan cukup menantang, dan sarana transportasi yang belum memadai, serta kemampuan berbahasa indonesia sebagai alat komunikasi antara guru dan peserta didiknya juga menjadi kendala utama terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.

Oleh sebab itu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten provinsi maupun kabupaten dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang ada di papua, serta penambahan personil jumlah tenaga pendidikan melalui penerimaan pegawai.diperlukan upaya dari pemerintah kabupaten untuk mendatangkan tenaga Guru dari pemerintah kabupaten mimika untuk mengajar di pedalaman-pedalaman papua bisa berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat papua pada umumnya menjadi sesuatu yang diperlukan.

Kata Kunci: “Pelaksanaan Otonomi khusus dalam bidang pendidikan”

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Pemikiran

Penerapan Otonomi khususnya di Propinsi Papua penuh dinamika sehingga banyak menguras energi pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah. Bahkan dengan penerapan Otonomi Khusus bagi rakyat Papua semua masyarakat telah menaruh harapan kepada pemerintah pusat agar rakyat diwilayah tersebut boleh merasakan manfaat dari proses pembentukan Otonomi Khusus.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado

Kebijakan pemerintah pusat memberikan otonomi khusus bagi Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, merupakan suatu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat Papua. Namun pada kenyataannya, sejak tanah Papua terintegrasi dengan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963, janji pemerintah Indonesia terhadap masyarakat dunia bahwa pemerintah akan memperhatikan nasib masa depan masyarakat asli dan akan mensejahterakan masyarakat Papua melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Baru Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, dalam implementasinya telah menghasilkan pembangunan politik di Papua dengan keteringgalan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, intimidasi, teror, pengejaran, penyiksaan, pembunuhan, penjarahan, perampasan, memarginalkan orang Papua dalam segala aspek, dan dijadikan sebagai daerah operasi militer (DOM), serta dijadikan kepentingan kesejahteraan ekonomi baret hijau. Sampai dengan saat ini masyarakat Papua jauh tertinggal dalam segala aspek kehidupan, dibanding dengan daerah lain di Indonesia.

Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan inspirasi rakyat Papua, yang memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan, sehingga melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2, di sebutkan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di provinsi Papua.

Otonomi khusus dalam hukum internasional telah diakui sebagai salah satu jalan untuk menghindari proses disintegrasi dari suatu Negara. Oleh karenanya hukum internasional memberikan penghormatan terhadap perlindungan dari suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Untuk itu salah satu keuntungan dari penerapan otonomi khusus adalah sebagai sarana solusi penyelesaian konflik. Perkembangan dari prinsip-prinsip otonomi ini sebagai hasil dari perkembangan hukum internasional secara umum didasarkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia secara langsung, yang berdampak pada kemajuan standar umum bagi kepercayaan terhadap demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dari suatu Negara.

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua sejak diberlakukannya otonomi khusus yang sudah berjalan selama 14 tahun, ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah seharusnya Papua mampu untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2001 pemberian dana dalam rangka otonomi khusus sudah mencapai Rp. 28 triliun diluar dana perimbangan lainnya, namun begitu belum memberikan dampak perubahan yang signifikan ditinjau Papua atas dana yang sebanyak itu. Kenyataan seperti ini, apabila pemerintah tidak mengambil langkah maju yang tepat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan orang Papua, sampai masa berakhirnya undang-undang otonomi khusus yaitu selama 25 tahun sesuai amanat undang-undang tersebut, sangat kemungkinan memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk meminta solusi lain karena ketidakberhasilan implementasi otonomi khusus.

Namun hal yang berbeda ditemukan dalam bidang pendidikan, apabila partisipasi masyarakat meningkat setelah terbentuk Undang-Undang Otsus pendidikan Papua hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Undang-undang Otsus, Pasal 56:1-6, mengatur tentang hak setiap penduduk memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan dengan meminimalkan beban masyarakat sekecil mungkin. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota diharuskan memfasilitasi dalam bentuk bantuan subsidi yang diatur lebih lanjut di dalam Perdasi tentang pendidikan.

Terkait dengan regulasi di atas, maka bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan di kabupaten kota, kebijakan pendidikan kabupaten kota misalnya di kota Jayapura, kabupaten Jayapura, kabupaten Merauke, dan kabupaten Teluk Bintuni diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, terutama untuk suksesnya wajar 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana fisik non fisik dan meningkatkan jumlah dan mutu pengajar. Dalam implementasinya, dana otsus yang disediakan Pemerintah daerah untuk dikelola oleh dinas terkait, tidak sesuai kebutuhan dan masih kurang transparan terhadap besaran alokasi dana.

Selama implementasi otonomi khusus, pendidikan bermutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan umumnya hanya dapat dinikmati oleh masyarakat asli Papua yang tinggal di perkotaan dan sekitarnya. Sedangkan mereka yang berada di kampung-kampung yang sulit diakses dari ibukota belum memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Hal ini diperkuat oleh data dari sebuah yayasan lokal yang secara khusus didirikan untuk membangun pendidikan di Pegunungan Tengah Papua yang mengatakan bahwa kondisi pendidikan di Papua, terutama di daerah pedalaman di pegunungan Papua termasuk yang paling buruk di Indonesia. Hal lain yang terjadi yakni alokasi bantuan beasiswa juga menjadi sangat terbatas dan tidak lancar. Padahal undang-undang Otonomi khusus Pasal 56 ayat 3 dan penjelasannya telah mengamanatkan perlunya alokasi pembiayaan seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra putri asli Papua pada semua jenjang pendidikan.

Dalam kaitannya dengan layanan pendidikan, alokasi dana pendidikan yang seharusnya diterima berdasarkan amanat undang-undang otonomi khusus setiap tahunnya adalah rata-rata sebesar Rp. 1,03 triliun, namun kenyataannya selama ini dana yang diberikan hanya mencapai 12% tingkat provinsi Papua sebesar Rp. 242,06 miliar. Alokasi dana pendidikan dari dana otonomi khusus selama ini tidak relatif, sehingga masalah pendidikan di Papua pada umumnya sampai saat ini masih dalam kategori rata-rata dibawah standar nasional.

Hal inilah yang mendorong penulis mengangkat bahasan penelitian dengan menitikberatkan pada: "Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Alasan penulis mengangkat tema tersebut diduga bahwa tingkat pelayanan Pendidikan masih belum membaik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah maju dalam dunia pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Apakah Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi khusus Bidang Pendidikan sudah mampu meningkatkan proses pelayanan Publik dibidang Pelayanan pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi khusus terhadap Bidang Pelayanan pendidikan di Distrik Alama kabupaten Mimika Provinsi Papua
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua

D. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masuk bagi pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberlakuan Otonomi khusus di propinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pelayanan Publik khususnya pelayanan dibidang pelayanan pendidikan

2. Manfaat Ilmiah

Dari segi Ilmiah hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya memperkaya konsep-konsep pelaksanaan Otonomi Khusus sesuai Kebijakan melalui pembentukan konsep Otonomi khusus dan Pelayanan Publik yang maksimal. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang mengembangkan penelitian tentang otonomim khusus di papua.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Persepsi Masyarakat

Taufik (2012:10) Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyelidiki mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkan untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi (tingkah laku atau tindakan) merupakan akibat suatu motif tertentu yang merupakan wujud dari persepsi dan sikap terhadap suatu objek yang sering kali dipergunakan untuk menunjukkan respon individu atau masyarakat. Persepsi individu akan mempengaruhi sikap individu terhadap suatu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi atau suatu perilaku sekelompok orang tersosialisasi ke dalam suatu masyarakat yang memiliki dua alternatif.

Apakah masyarakat menerima rangsangan tersebut atau tidak. Sikap seperti ini merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk berperilaku tertentu, bila ia menghadapi rangsangan tersebut. Thoha (1998:23) persepsi hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.

Robbins (2003:88) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan mereka. Definisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2000:45), sebagai suatu penerima yang baik atau pengambilan inisiatif dan proses komunikasi. Persepsi adalah suatu

proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan di dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima alat indera. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Persepsi juga dapat diartikan analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi yaitu sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan mereka.

Rakhmat (2005:55) mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, keperibadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Selanjutnya Robbins (2001:89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Menurut Danzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2008:4-5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2008:1). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu

dengan situasi yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori. Yaitu menggambarkan persepsi masyarakat distrik Alama tentang otonomi khusus papua.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada persepsi masyarakat distrik Alama tentang otonomi khusus papua, yang dinilai melalui indikator menurut pandangan Robbins (2001:89) sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
2. Persepsi Masyarakat tentang kualitas pendidikan di Distrik Alama.

C. Informan Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari atas pendapat Harun Nasution (Sugiyono, 2007:60) yang menyatakan bahwa: dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Sedangkan untuk pengumpulan data penelitian akan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Informan yang diteliti digolongkan kedalam dua golongan yakni,

- (1) Informan ahli yakni orang yang mengetahui dengan jelas kondisi daerah penelitian dan mampu menunjukkan siapa-siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Biasanya yang bertindak sebagai informan ahli adalah:
 - Kepala Distrik
 - Sekretaris Distrik dan Kepala-Kepala seksi
- (2) Informan biasa, yakni orang yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Informan biasa yang diambil untuk masalah penelitian yakni:
 - Masyarakat
 - Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama
 - Anggota DPRD Kabupaten Mimika
 - Sekretaris Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten mimika

D. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni :

- a. Observasi, yakni teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Dengan cara observasi dapat ditemukan data-data tentang bagaimana tingkah laku ataupun aktivitas keseharian masyarakat desa yang berguna dalam mengkroscek kebenaran data nantinya. Observasi penelitian sebagai pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reabilitasnya. Teknik ini bertumpu pada indra yang dimiliki, yakni penglihatan, penciuman, peraba serta pendengaran. Dengan melakukan observasi, maka data yang diperoleh meliputi bagaimana aspek fisik dari daerah yang diteliti, apa saja kegiatan dan interaksi yang terjadi, siapa pelaku yang terlibat dari aktivitas tersebut, serta berapa lama durasi serta frekuensi terjadinya.
- b. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan, untuk mendapatkan data terkait dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan utama

wawancara antara lain : (a) Untuk menggali pemikiran seorang informan, yang berhubungan dengan sebuah peristiwa, perasaan, perhatian dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas budaya sesuai dengan fokus masalah yang ingin dipecahkan. (b) untuk merekonstruksi pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu, (c) untuk mendapatkan gambaran pemikiran terhadap budaya yang dimikinya dimasa depan.

- c. Studi Literatur, merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Studi literature ini dilakukan untuk membantu peneliti memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti dan teori-teori serta konsep untuk menganalisis permasalahan dan juga sebagai penambah wawasan peneliti. Salah satu yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian adalah mendayagunakan sumber informasi yang di dapat di perpustakaan.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Menurut Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengatakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi:

- a. Data reduction (reduksi data). Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisa. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok/penting sesuai dengan tema penelitian dan membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan. Dengan dilakukannya reduksi data, maka diperoleh gambaran yang lebih jelas serta diketahui data-data apa yang masih dibutuhkan atau perlu dilengkapi.
- b. Data display (penyajian data). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami.
- c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Setelah disajikan dalam bentuk uraian naratif, peneliti membuat kesimpulan awal dari data tersebut. Apabila serangkaian kesimpulan yang dibuat dari setiap aktivitas pengumpulan data menunjukkan adanya suatu konsistensi, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid. Sementara untuk memverifikasi data, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Di Distrik Alama

Persoalan pendidikan di Tanah Papua jika di amati secara seksama memang masih memprihatinkan, meskipun Papua sudah di bantu oleh pemerintah pusat dengan memberikan anggaran yang cukup besar, atau yang biasa di sebut dengan otonomi Khusus, hanya dapat terasa sampai di sekolah-sekolah yang ada di perkotaan saja, sedangkan sekolah sekolah yang ada di daerah terpencil termasuk di Distrik Alama masih banyak yang belum di perhatikan. Ada perbedaan apabila dibandingkan dengan sekolah yang ada di perkotaan berbeda dengan yang ada di pedalaman terpencil mulai dari bangunanya, sarana dan prasarananya, media pembelajaran yang di pakai, dan juga tenaga guru yang masih minim apalagi jika kita melihat pada kondisi geografi,

hampir sebagian besar masyarakat distrik Alama banyak yang tinggal di pedalaman terpencil, yang sulit di jangkau dan di pesisir pantai.

Pemerataan pendidikan di Distrik Alama masih belum stabil, inilah yang menjadi masalah hampir 50 % anak anak yang ada di Distrik Alama belum mendapatkan pendidikan yang layak, banyak yang tidak bersekolah, buta huruf, tidak bisa baca dan menulis.

Seperti yang diungkapkan oleh kepala distrik Alama, beliau mengatakan bahwa:

"kondisi pendidikan di Distrik ini dari segi infrastruktur masih perlu ditingkatkan mengingat bangunan sekolah yang belum cukup representative untuk diselenggarakannya pendidikan, begitu pula dengan tenaga pendidiknya harus ditingkatkan, mulai dari kualitas dan kuantitas, karena selama ini proses pendidikan yang berlangsung untuk SD, SMP, dan SMA hanya sekedar menggunakan fasilitas yang seadanya".

Walaupun sudah di lakukan program pemberantasan buta huruf di Papua. tetapi masih saja ada yang belum bisa membaca menulis dan berhitung, meskipun sudah di kirim tenaga guru ke wilayah pedalaman, dan pesisir, tetapi banyak yang tidak betah, tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, kondisi ekonomi, banyak hal yang mempengaruhi sehingga membuat mereka tidak mampu mengabdikan di tempat tugas.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Alama, beliau mengatakan bahwa:

Di sekolah ini tenaga pendidik berjumlah 5 orang sudah satu kali dengan kepala sekolahnya, sedangkan kelas ada enam kelas, jadi secara kuantitas kami masih membutuhkan tenaga guru, pada tahun 2015 lalu ada tenaga guru yang diperbantukan oleh pemerintah kabupaten, namun mereka tidak bertahan lama hanya satu tahun saja, baru bulan Maret lalu mereka sudah di tarik kembali ke kabupaten".

Tantangan terbesar yang masih sangat sulit untuk di pecahkan hingga saat ini, untuk itu solusi untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar adalah mempersiapkan tenaga guru yang berasal dari papua atau yang sudah lama di papua sehingga mereka tidak terkejut dengan kondisi yang ada di papua yang cukup ekstrim siap untuk di tempatkan di mana saja, mempersiapkan tenaga guru bisa beradaptasi dengan lingkungan, di mana tempat dia bekerja, mampu menguasai bahasa daerah setempat di mana dia bekerja, karena bahasa merupakan salah satu dari masalah education, banyak siswa yang tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga banyak guru yang sulit untuk mengajarkan materi pelajaran kepada siswa, padahal untuk mempelajari ilmu pengetahuan kepada siswa di perlukanya bahasa.

Seperti wawancara dengan salah satu masyarakat di distrik Alama yang mengatakan bahwa:

"Perlu masa depan adik-adik kami yang ketinggalan dalam hal sumber daya manusia, pemerintah sekarang semua jiwa membangun politik bukan pejabat bangun pemerintah susa melihat lingkungannya sendiri takut padi mati di atas berasnya di mana manusia tidak perna rasa bauh sesuatu ada busuk alamnya sendiri, untuk itu kami sarankan kepada pemerintah daerah DPRD dan Bupati harus tangunjawabkan sekolah-sekolah Dasar yang ada di pedalaman-pedalaman".

Perubahan besar dapat terjadi di papua apabila pendidikan sudah berjalan dengan baik dan merata, mengapa demikian karena pendidikan di papua merupakan ujung tombak dalam perubahan sumber daya manusia (SDM) yang ada di papua khususnya Distrik Alama.

Masalah pendidikan di Papua adalah topik yang paling hangat menjadi perbincangan selama dua puluh tahun terakhir. Wartawan luar negeri akan selalu

mengaitkan antara kemajuan Papua dan alasan Papua bergabung dengan Indonesia. Contohnya: Sudah berapa lama Papua bagian Indonesia dan mengapa tidak ada kemajuan dan bergerak sangat lambat? Perlu diketahui, bahwa bukan hanya Papua saja yang pergerakan sosial ekonomi lambat, tetapi banyak juga daerah di luar Jawa.

Salah satu tokoh masyarakat Samuel Amisim Distrik Alama berpendapat bahwa:

“dahulu, sebelum Pak Jokowi membangun bandara di Sorong, yang sekarang di tahun 2016, bandara tersebut menjadi cukup megah, pembangunan di Papua dapat dilihat dari bentuk Bandara saja. Sebagai contoh ketika kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta, Surabaya, Makasar atau Ambon, kemudian menginjakkan kaki di Papua, maka kesenjangan itu akan mulai dapat dirasakan. Bandara Papua saat itu sangat kecil dan jorok, jauh lebih kotor daripada terminal. Termasuk juga bandara di Biak”.

Jika pembangunan fisik dan infrastruktur dapat berjalan dua tahun selama kepemimpinannya, bagaimana dengan pembangunan Sumber Daya Manusianya, peningkatan kualitas peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana mengurai masalah pendidikan di Papua, persoalan ini adalah sangat kompleks dan abstrak. Salah seorang tokoh pemudah Amos Wantik warga Distrik Alama mengatakan bahwa:

“disini ada lembaga Pengembangan Amungme Kamoro Pertangjawaban yang jelas artinya kerja sama antara masing-masing studi atau lembaga pendidikan di papua maupun di luar papua supaya tim kerja antara lembaga pendidikan baik dan jujur saat ini, dapat tipu banyak dari tim kerja sama jangan masing-masing cari uang maka. Harus awasi dengan baik Kami dari pelajar biayanya pendidikan selalu putar putar lorong cari makan di orang punya daerah”.

Apakah masalahnya adalah masalah geografis? Indeks kemahalan? Atau kondisi geografis dari lembah-lembah, gunung-gunung, dan pantai-pantai yang sangat susah dijangkau? Berikut ini adalah penuturan dari salah satu tokoh pendidikan di Distrik Alama yang menjadi Kepala Sekolah Dasar Distrik Alama:

“mungkin alasannya adalah kondisi infrastruktur yang sangat terbatas. Banyak jalan yang ada adalah peninggalan Belanda, termasuk pelabuhan. Belum ada pembangunan berarti selama beberapa tahun, kecuali di tangan Jokowi, sudah ada pembangunan sedikit demi sedikit. Sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan ketiadaan infrastruktur, Belanda yang mampu membangun bendungan yang konon bisa bertahan 10,000 tahun dan Jepang yang mampu membangun terowongan bawah laut di tengah segala keterbatasan geografis. Masalahnya untuk membangun infrasturktur diperlukan apa, untuk mengatasi kendala geografis diperlukan apa, jadi mungkin alasan ini bukan masalah yang utama dalam perspektif saya”.

Termasuk juga pembangunan gedung sekolah, apakah mahal membangun sekolah dasar, dan segala perlengkapannya, tetapi kenyataannya tidak disetiap kampung atau distrik di Papua ada akses sekolah dasar, yang lebih menyedihkan lagi, walaupun ada akses sekolah dasar, tidak ada guru. Masalah selanjutnya walaupun ada guru, apakah guru tersebut masuk kelas dan mengajar, apakah guru tersebut mengajar dengan baik, bagaimana kualitas gurunya, tetapi kembali lagi, sebelum persoalan kualitas guru dipermasalahan, banyak tidak tersedia guru. Tidak ada guru.

Meskipun sudah banyak guru yang bersertifikasi, hingga saat ini dirasa belum dapat menjamin peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Papua. Wakil Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Distrik Alama Marthen Taniti mengatakan bahwa:

“meskipun untuk sementara ini belum ada perubahan ke arah perbaikan, tetapi semangat untuk bekerja dan melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing sudah ada, dengan adanya sertifikasi ini sebenarnya sudah memberikan harapan bagi para

guru, keberadaan sertifikasi ini sangat membantu menupang kesejahteraan guru yang selama ini dipantau oleh PGRI, misalnya saja ada guru yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan, namun dengan adanya tunjangan guru karena sertifikasi ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhannya, tidak hanya itu ke depan masalah tunjangan guru yang dikawal PGRI diharapkan dapat diselesaikan secara baik sehingga guru yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Pendekatan yang akan dilaksanakan melibatkan pengenalan pada Pendidikan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu, di mana anak-anak mulai belajar melalui bahasa ibu di kelas-kelas awal dan kemudian secara bertahap belajar untuk menggunakan Bahasa Indonesia secara keseluruhan. Terdapat bukti-bukti menarik yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan pembelajaran dalam kurikulum, sehingga mendorong efisiensi pendidikan, serta mencegah punahnya keanekaragaman bahasa dan budaya di Distrik Alama.

Kepala Distrik Alama, Altianus Uamang,SH mengatakan bahwa:

“sejumlah dukungan dana untuk mengintegrasikan program pendidikan berbasis multi bahasa ke sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil Papua telah dilakukan, termasuk di Distrik Alama ini, saat ini telah kembangkan rencana empat tahun kedepan yang akan dimulai Juli 2016, untuk mengimplementasikan program percontohan di salah satu Distrik yaitu di distrik Alama ini”.

Bahasa Indonesia menjadi bahasa sekunder pada hampir semua penduduk Distrik Alama dan penguasaan terhadap bahasa nasional tersebut pada saat itu lemah. Lani adalah bahasa pertama pada hampir seluruh anak di kabupaten tersebut, dan kabupaten lain di sekitarnya, termasuk di Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah dasar yang ada di Distrik Alama mengatakan bahwa:

“Anak-anak didik kami kebanyakan mempunyai kesulitan dalam berbahasa Indonesia, pengejaan, kosakata, dan penulisan masih sering menemui kesulitan-kesulitan, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa, sehingga setiap anak bangsa harus mengetahui dan menggunakan bahasa nasional”.

Dari sampel sebanyak 184 siswa kelas 2 dan kelas 3, sebanyak 75% dari seluruh siswa menganggap Bahasa Indonesia sulit, sementara 88% menganggap Bahasa Lani mudah. Hanya sekitar 13% dari siswa tersebut yang lancar dalam dua bahasa tersebut (dwi-bahasa).

Namun demikian, meski tiga kali lipat siswa menganggap Bahasa Lani mudah dan Bahasa Indonesia sulit, hampir sebagian besar guru menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas dan hanya sebagian kecil saja guru yang menggunakan Bahasa daerah. Lebih lanjut, sebagian dari siswa umumnya dilarang menggunakan bahasa lokal mereka ketika di sekolah. Seperti hasil wawancara dengan guru berikut ini:

“Dibandingkan, siswa di asrama dengan guru non-Papua lebih mungkin untuk dipukuli jika menggunakan bahasa lokal dibandingkan dengan siswa di sekolah lainnya. Hal ini mencerminkan betapa Penerapan Pendidikan Multi Bahasa berbasis Bahasa Ibu sangat dibutuhkan untuk membuat pelajaran yang diberikan kepada kelas awal bisa dipahami dengan lebih mudah, sehingga mempercepat pembelajaran, dan di saat yang bersamaan melindungi serta menghormati bahasa dan kebudayaan lokal”.

Masalah yang selanjutnya dalam peningkatan mutu pendidikan di Papua adalah keinginan masyarakat lokal. Pada saat Ki Hadjar Dewantara mulai merintis pendidikan

di tanah Jawa, Sumatera dan Bali, belum ada pendidikan formal di Papua. Penuturan dari salah seorang informan yang adalah Guru SMP di Distrik Alama mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami mengajar murid SMP ketika mereka berusia 20 tahun bahkan 21 tahun, disebabkan karena ketersediaan sekolah. Jadi, ketika sekolah SMP dibuka, maka siapapun akan kembali belajar dan menempuh pendidikan. Budaya pendidikan ini sebenarnya lebih baik jika dirintis sejak dini. Ketika ada pendidikan usia dini, masyarakat sekitar akan mempunyai perhatian lebih. Kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan. Bagi masyarakat lokal, tidak semua orang tua mendukung pendidikan”.

Kesadaran masyarakat lokal ini sangat penting. Banyak masyarakat lokal yang lebih mendukung anaknya untuk bekerja, mencari ikan di laut, menebang kayu di hutan, atau menangkap udang. Bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat yang mendukung pendidikan, tetapi gizi anaknya tidak diperhatikan. Misalnya anaknya tidak sarapan di sekolah ataupun tidak diberi uang saku, dan akhirnya tidak dapat konsentrasi di sekolah karena lapar. Tidak ada buku, mereka mungkin punya uang banyak, tetapi pendidikan bukanlah investasi yang penting bagi mereka. Oleh sebab itu, di beberapa daerah yang sangat-sangat sulit dijangkau pendidikan alternatif adalah solusinya. Seperti contohnya Sokola Rimba, dimana murid bisa datang kapanpun untuk belajar.

Sebenarnya sudah ada secercah harapan di Papua. Lulusan-lulusan perguruan tinggi sudah banyak mengajar di Papua. Tetapi mereka hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga di kabupaten-kabupaten baru dan daerah terpencil banyak belum tersentuh, penuturan dari kepala SMP Negeri Alama Bapak Bame mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kuncinya adalah masyarakat lokal sendiri, harus semakin banyak yang menjadi guru dan dokter. Dua hal dasar di Papua, pendidikan dan kesehatan. Dan tentu saja persoalan pendidikan jauh lebih mudah diselesaikan dibandingkan dengan persoalan kesehatan, setidaknya sudah banyak guru asli Papua. Guru dengan kualitas sangat baik pun akan semakin sering ditemukan. Tetapi dokter asli Papua, masih memerlukan perjalanan sangat panjang. Membangun fakultas kedokteran di perguruan tinggi seperti UNCEN dan UNIPA jauh lebih sulit dan mahal dibanding meningkatkan kualitas lulusan guru dan pendidikan dasar di perguruan tinggi, perlunya disediakan kesempatan lebih bagi masyarakat lokal untuk dapat menempuh pendidikan yang bermutu. Kalau perlu secara gratis Tetapi saya yakin itu membutuhkan waktu yang sangat lama, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. Anak-anak Papua yang bisa sampai perguruan tinggi berarti mempunyai daya juang yang luar biasa di tengah ketiadaan akses pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Mereka belajar untuk melawan nasib. Tetapi sekali lagi, jumlahnya tidak banyak. Banyak aparatur daerah di Papua bukan warga asli Papua karena ketiadaan lulusan, sehingga banyak mengambil dari daerah lain.

Senada dengan pendapat Bapak Yan Yikwa, salah seorang tokoh pendidikan lainnya yaitu Bapak Lukas Wenda mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk membangun pendidikan di Papua, adalah membangun masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus mempunyai keinginan dan tindakan untuk terus belajar. Pemerintah daerah harus memfasilitasi anak Papua untuk menempuh pendidikan. Sekarang ini sepertinya masih belum ada kerjasama yang baik. Contohnya, perguruan tinggi banyak menyalahkan kualitas input anak SMA yang masuk perguruan tinggi karena beberapa diantara ternyata ada yang masih mengalami kesulitan membaca dan menulis. Dan akhirnya kualitas guru yang menjadi akar permasalahan”.

Kepala Distrik Alama Altianus Uamang,SH mengatakan bahwa:

"Saya percaya masalah pendidikan dasar di Papua akan segera terselesaikan. Setidaknya pemerintah sudah mulai meluncurkan program SM3T. Program mengajar di pedalaman bagi lulusan guru. Selain itu banyak gerakan masyarakat lokal yang sedang menggeliat. Misalnya adalah buku untuk Papua, untuk menanamkan kecintaan membaca sejak dini di Papua. Banyak juga masyarakat yang mengabdikan diri di tempat-tempat terpencil untuk mengajar".

Harus ada rasa saling percaya diantara masyarakat lokal untuk pembangunan pendidikan Papua ke depan. Persoalan infrastruktur bukan masalah utama, tetapi ketersediaan guru dan penyebaran guru di daerah yang sulit dijangkau. Masalah selanjutnya adalah peningkatan kualitas guru dan akses pendidikan yang menyeluruh dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan biaya yang terjangkau. Harus disediakan pendidikan afirmasi untuk anak-anak Papua yang dari pedalaman. Contohnya, ketika mereka SMA mungkin mereka belum lancar membaca dan menulis. Bukan karena bodoh, tetapi karena mereka tidak pernah diajar dan belajar selama di SD dan SMP. Demikian juga, anak-anak Papua yang belajar di perguruan tinggi harus selalu dipantau perkembangannya. Harus ada divisi khusus untuk membantu mereka cara-cara belajar yang efektif, sehingga mereka dapat menyelesaikan bangku pendidikan tinggi. Sudah banyak anak putus sekolah di SD, SMP dan SMA, Perguruan tinggi juga harus menjembatani anak-anak Papua yang sudah kuliah.

Masalah pendidikan di Papua tidak akan pernah dapat diselesaikan selama setahun atau dua tahun. Tetapi perlu program jangka panjang dan kerjasama pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Butuh kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya arti pendidikan. Butuh kerjasama antara semua lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Meskipun kini banyak orang Papua sudah bersekolah tinggi, bahkan hingga menjadi profesor dan doktor, namun realitas itu belum menggambarkan kondisi nyata wajah pendidikan di Papua. Pendidikan di Papua masih didera masalah klasik. Antara lain ketersediaan guru yang sangat minim dan tidak merata, banyak siswa kelas enam SD yang belum mampu membaca, minimnya fasilitas penunjang, serta masih rendahnya kualitas lulusan.

Suramnya pendidikan di Papua sering disebabkan oleh para pelaku pendidikan itu sendiri. Hal ini tergambar dari banyaknya guru yang malas bertugas di daerah-daerah perbatasan dengan berbagai alasan klasik. Tantangan guru di daerah perbatasan di antaranya adalah sulitnya transportasi, kurangnya air bersih, tidak adanya rumah dinas, masyarakat yang nomaden, dan masih berkembangnya budaya kamiri yang mengharuskan anak-anak ikut orangtua ketika mencari ikan atau sagu.

Menurut salah seorang Masyarakat Kabupaten Mimika

"Keterlambatan dan ketidakhadiran guru banyak terjadi pada guru yang bertugas di sekolah wilayah pinggiran, perbatasan, dan terpencil," lanjut Alexander Yamlai, belum lama ini. Menurutnya, guru honorer cenderung lebih rajin kehadirannya dibandingkan guru PNS.

Selain faktor banyak guru yang tinggal di kota, faktor banyaknya kepala sekolah yang tidak transparan kepada guru dan masyarakat mengenai bantuan dana ke sekolah juga memicu kesenjangan kepala sekolah dan guru kelas. Hal itu sering memicu guru tidak betah mengajar.

Atas hasil temuan itu, sebagai pengawas Alexander Yamlai dan beberapa pengawas menyampaikan beberapa rekomendasi dan sepakat terhadap beberapa

kebijakan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika demi peningkatan kualitas dan kinerja para guru dan kepala sekolah di kabupaten Timika.

Beberapa rekomendasi tersebut adalah, pertama, guru yang tinggalnya jauh diberi Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Mimika, beliau mengatakan bahwa:

Pemerintah siapkan fasilitas rumah dinas yang layak. Kedua, perlu ada regenerasi dan mutasi terhadap beberapa sekolah utamanya kepala sekolah yang sudah lama bertugas di satu sekolah. Ketiga, perlu ada ketegasan dan sanksi dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan BKD kepada guru mangkir. Keempat, perlu ada tambahan insentif sebagai penghargaan bagi guru yang rajin.

Permasalahan di atas juga dirasakan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika, Fitria Fivie Palenewen. Menurutnya,

masalah yang "berkaitan dengan regulasi maupun piranti tentang jabatan dan penilaian kinerja guru sudah cukup jelas dengan diterbitkannya berbagai regulasi jabatan dan penilaian kinerja guru yang terbaru".

Persoalannya sekarang, apakah pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah bergandeng tangan dalam menyosialisasika secara benar, utuh, dan menyeluruh tentang berbagai aturan regulasi jabatan dan penilaian kinerja guru yang terbaru itu?

Pengawasan terhadap kinerja guru bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan, melainkan tanggungjawab bersama para pengambil kebijakan, orang tua, dan kalangan masyarakat luas. Kurang terintegrasinya pengawasan terhadap kinerja guru menjadi salah satu faktor penurunan komitmen kinerja guru. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru di Mimika sangat tinggi.

Hal ini sudah dirasakan Ibu Fivie sejak ia menjadi seorang guru. Seiring berjalannya waktu, pemerintah (pusat dan daerah) telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, memberlakukan disiplin guru dengan berbagai aturan, namun semua itu belum juga mengurangi permasalahan ketidakhadiran guru utamanya di kabupaten Mimika.

Walaupun demikian, berbagai persoalan dan masalah pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme – Kamoro (LPMAK), sebagaimana selalu memberikan perhatian atas masalah pendidikan, hingga kampung – kampung yang berada di pedalaman juga ikut dibantu.

Masalah pendidikan secara umum, terjadi hampir seluruh tanah Papua, sehingga sangat jelas masih membutuhkan perhatian semua pihak dan kerjasama, sehingga mendorong perubahan untuk pendidikan yang lebih maju.

Potret pendidikan di Papua masih memprihatinkan, karena penanganan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun SDM Papua ternyata tinggal sebuah harapan yang tak kunjung direalisasikan secara maksimal. Berbagai hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era OTSUS ini, ternyata menjadi biang kerok suramnya masa depan generasi muda Papua.

Kalau dilihat secara cermat, maka dana OTSUS yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 30 persen. Dana 30 persen ini diperuntukkan bagi peningkatan SDM Papua yang berkualitas lewat pendidikan di sekolah-sekolah. Karena salah satu tujuan dari pemberian dana itu adalah untuk meringankan beban orangtua dengan cara bebas biaya pendidikan (gratis) namun, kenyataannya tidak demikian.

Hal ini bukan tidak mungkin, karena Pemerintah Provinsi Papua juga mengakui adanya berbagai kekurangan dalam mengatasi bidang pendidikan di Provinsi paling timur Indonesia ini.

Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP, MH.,

Dalam sambutannya pada Rapat Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga se Provinsi Papua, belum lama ini menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan memiliki peran penting dan strategis, karena itu dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya. Oleh sebab itu, layanan pendidikan harus dipastikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah – daerah terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada pada 63% dibanding rata-rata nasional 73 persen (%).

Untuk itulah, Gubernur berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, harus benar-benar serius memikirkan program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar. Enam masalah mendasar tersebut adalah:

Pertama, masih banyak penduduk usia 0 – 6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena terbatasnya lembaga PAUD sehingga mengakibatkan anak masuk SD kurang siap dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.

Kedua, masih banyaknya penduduk usia 7–12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah di sejumlah kampung yang tersebar di gunung dan lembah belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar. Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk dibangku pendidikan dasar namun tidak bisa menikmatinya, hal ini berakibatkan pada rendahnya capaian Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Papua sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan oleh MDGs, yang secara nasional dari tahun ke tahun kita selalu berada di urutan terendah

Ketiga, APM SD terendah ada di kabupaten Nduga, 15,6%. Ini artinya penduduk usia 7 - 12 Tahun di kabupaten Nduga yang bersekolah di SD hanya 15,6% sedangkan 84,4% tidak bersekolah.

Keempat, masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolasi belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas.

Kelima, masih tingginya angka Tuna Aksara atau buta aksara penduduk usia 15 – 59 tahun. Ada sekitar 675,253 jiwa atau 35,98% dari 1,876,746 jiwa, masih tuna aksara.

Keenam, kekurangan guru sekolah dasar di daerah- daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Papua. Kalau siklus analisis ini dilakukan secara baik tahap demi tahap, maka dipastikan program yang akan disusun, harus tepat sasaran, tepat pembiayaan, yang implementasinya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat semakin nyata.

Diharapkan, penyelenggaraan pendidikan terutama di Sekolah Dasar yang berada di daerah pedalaman dan terpencil mampu menjembatani kesenjangan budaya di dalam keluarga dan masyarakat dengan budaya belajar di sekolah. Kita juga merasakan bahwa sampai saat ini kita dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra masih terbatas.

Masalah lainnya, juga disampaikan Ketua Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IP-MAMI) di Manado Sulawesi Utara Mianus Mulugol mendesak agar pemerintah Kabupaten mimika papua transparan dalam pembagian dana pendidikan, terhadap sekolah-sekolah yang ada di pedalaman-pelaman seperti, Distrik Alama, bela, jila, tsingah aroanop dan pedalaman lainnya yang ada di kabupaten mimika provinsi papua.

“Tidak ada pemotongan sepuluh persen yang digembar-gemborkan itu. Yang ada adalah pemotongan pajak penghasilan. Kalaupun ada indikasi saya mohon cepat menghubungi Kadis Pendidikan dan Walikota Jayapura,” ungkap Betaubun kepada tabloidjubi.com, terkait rumor pemotongan sepuluh persen dana sertifikasi guru di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Jayapura, Rabu (26/3)

Tanggapan yang sama dari Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kenius Kogoya, yang membidangi pendidikan meminta para bupati yang ada di Papua agar konsisten dengan pembagian 30 persen dana Otsus untuk pendidikan.

“Ini penting. Paling urgen mengenai dana pendidikan 30 persen. Dengan adanya gubernur dimana dana Otsus paling banyak ke kabupaten, kami harap bupati konsisten mengalokasikan 30 persen dana Otsus itu untuk pendidikan. Buta aksara, pendidikan usia dini dan lainnya harus dijawab dengan anggaran itu,” kata Kenius Kogoya, belum lama ini.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum eksistensi pembangunan sumber daya manusia Papua belum berjalan secara baik. Bahkan, semua dana terkesan di proyeksikan untuk kepentingan tertentu tanpa melihat output atas sebuah kebijakan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat terhadap Otonomi Khusus Papua di Distrik Alama khusus masalah pendidikan masih buruk, hal ini disebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, ditambah dengan jumlah tenaga pendidik, dan kualitas pendidik yang belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Distrik Alama, hal ini terkait dengan wilayah topografi papua yang dapat dikatakan cukup menantang, dan sarana transportasi yang belum memadai, serta kemampuan berbahasa indonesia sebagai alat komunikasi antara guru dan peserta didiknya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang ada di Distrik Alama, serta penambahan personil jumlah tenaga pendidikan melalui penerimaan pegawai.
2. Diperlukan upaya dari pemerintah kabupaten untuk mendatangkan tenaga Guru dari pemerintah kabupaten mimika untuk mengajar di distrik Alama, agar pendidikan di distrik Alama bisa berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat papua pada umumnya.
3. Diperlukan untuk mengatasi perkara pendidikan di Distrik Alama adalah, konsep pokok pendidikan Oleh pemerintah kabupaten mimika yang komprehensif, yang secara matang dipikirkan dan didiskusikan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Indrawijaya, Adam I. 2000. *Prilaku Organisasi*. Cetakan keenam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kerlinger, F.N. 1971, *Foundations of Behavioral Research*, 2nd Ed., New York, MacMillan.
- Lexy, Moleong, J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Abud Musa'ad.
- Ratminto dan Atik S, Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behaviour*. New Jersey, US : Prentice Hall.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. CV. Media Brilian. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*. 1989, LP3ES, Jakarta
- Sumule Agus. 2003, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syarifin, Pipin, dan Jubaedah, Daedah, 2005, Pemerintah Daerah Indonesia. Pustaka Setia. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung
- Thoha, Miftah. 1998 *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Winarno, Budi. 2001 *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta*

Sumber Lainnya:

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
- Johanes Supriyono adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia, Juli 12, 2013
- peneliti ahli di Lembaga Pendidikan Papua (LPP) Juli 12, 2011
- (dari berbagai sumber)